

**HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP DEMOKRASI DENGAN SIKAP  
DEMOKRATIS PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 MENGGALA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Lusiana  
NPM 1913032034**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP DEMOKRASI DENGAN SIKAP DEMOKRATIS SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 MENGGALA**

**OLEH**

**LUSIANA**

Demokrasi membutuhkan partisipasi dan usaha nyata dari setiap masyarakat maupun pemerintah agar kepentingan bersama dapat terwujud. Namun pada kenyataannya demokrasi tidak selamanya berjalan dengan baik tanpa hambatan, masih banyak masyarakat yang belum paham akan demokrasi sebagai sistem pemerintahan terlebih sebagai sikap hidup. Indonesia terus memperbaiki kekurangan demokrasi melalui masyarakat sebagai pemeran utama demokrasi. Salah satu cara memperbaiki kekurangan demokrasi tersebut adalah dengan cara memperbaiki pemahaman mengenai konsep demokrasi melalui pendidikan. Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep demokrasi dapat mendorong siswa untuk bersikap demokratis. Sikap demokratis harus ditanamkan sejak dini agar tidak terjadi kekeliruan dalam masyarakat terhadap demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah Siswa kelas XI jurusan IPA dan IPS yang berjumlah 70 siswa. Berdasarkan hasil pengolahan data dinyatakan bahwa pemahaman konsep demokrasi memiliki hubungan dengan sikap demokratis, dengan derajat hubungan sebesar 0,611. Dengan demikian bahwa ada hubungan yang kuat dan signifikan antara pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis, karena pemahaman yang dimiliki seseorang akan berdampak pada pola pikir sehingga membentuk sikap. Oleh sebab itu, adanya pemahaman mengenai konsep demokrasi akan berdampak terhadap sikap demokratis yang dimiliki siswa.

*Kata Kunci: Demokrasi, Pemahaman, Sikap, Demokratis, Nilai*

## **ABSTRACT**

### **THE CORRELATION BETWEEN UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF DEMOCRACY WITH DEMOCRATIC ATTITUDE OF CLASS XI STUDENTS OF SMA NEGERI 1 MENGGALA**

**By**

**LUSIANA**

Democracy requires real participation and effort from every community and government so that common interests can be realized. However, in reality democracy does not always go well without obstacles, there are still many people who do not understand democracy as a system of government, especially as a way of life. Indonesia continues to improve the shortcomings of democracy through society as the main actor of democracy. One way to improve the lack of democracy is by improving understanding of the concept of democracy through education. Thus, an understanding of the concept of democracy can encourage students to act democratically. A democratic attitude must be instilled from an early age so that there are no mistakes in society towards democracy. This study aimed to identify the relationship between the understanding of the concept of democracy and the democratic attitudes of 11st grade students of SMA Negeri 1 Menggala. The method used in this research is correlational with a quantitative approach. Respondents who were involved in this study were students of 11st grade majoring in science and social studies, totaling 70 students. Based on the results of data processing it is stated that understanding the concept of democracy has a relationship with democratic attitudes, with a degree of relationship of 0.611. Thus, there was a strong and significant relationship between the understanding of the concept of democracy and a democratic attitude, because someone's understanding will have an impact on the mindset so as to shape attitudes. Therefore, an understanding of the concept of democracy will have an impact on students' democratic attitudes.

*Keywords: Democracy, Understanding, Attitude, Democratic, Value*

**HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP DEMOKRASI DENGAN SIKAP  
DEMOKRATIS PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 MENGGALA**

**Oleh**

**Lusiana**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Program Studi PPKn**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP DEMOKRASI  
DENGAN SIKAP DEMOKRATIS PADA SISWA  
KELAS XI SMA NEGERI 1 MENGGALA**

Nama Mahasiswa : **Lusiana**

NPM : **1913032034**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

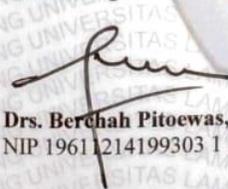
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

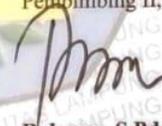


**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

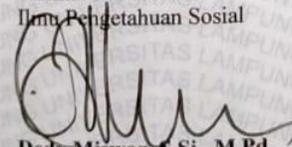
  
**Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**  
NIP 19611214199303 1 001

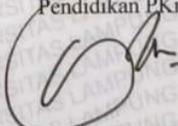
  
**Rohman, S.Pd., M.Pd.**  
NIK 231204840603101

**2. Mengetahui**

Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

  
**Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP 19741108 200501 1 003

  
**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19870602 200812 2 001

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

Ketua : **Drs. Berchah Pitowas, M.H**

Sekretaris : **Rohman, S.Pd., M.Pd.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**  
NIP. 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **5 Mei 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lusiana  
NPM : 1913032034  
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Cempaka Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang,  
Prov. Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Bandar Lampung, 09 Mei 2023



*Lusiana*  
Lusiana  
NPM. 1913032034

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lusiana yang dilahirkan di Menggala, tanggal 11 Agustus 2001 yang merupakan putri ketiga dari lima bersaudara, buah cintakasih dari pasangan Bapak Amri Norman dan Ibu Suharni.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tri Makmur Jaya pada tahun 2012, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Menggala yang diselesaikan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Menggala yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 melanjutkan keperguruan tinggi negeri yang tercatat sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Melalui jalur SBMPTN. Penulis melaksanakan KKN di Desa Tunggal Warga kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Organisasi yang pernah diikuti penulis diantaranya adalah Pramuka, Paskibra, Fordika, BEM FKIP, dan juga Gebyar Pelajar Lampung.

## **P E R S E M B A H A N**

Dengan mengharap ridho dan berkah dari Allah SWT, penulis mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan sehingga penulis dapat mempersembahkan karya tulis sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta kepada:

“Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Amri Norman dan Ibu Suharni yang aku sayangi dan aku cintai. Yang selalu menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang, yang selalu menyayangi tanpa tapi, mendoakan dengan setulus hati, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Terima kasih telah merawatku dan menjagaku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus. Aku memohon maaf karena aku belum bisa menjadi seseorang yang hebat, tetapi aku selalu berusaha untuk membuat kalian tersenyum bangga melihatku dan tak lupa pula aku selalu berdoa agar Ayah dan Ibu sehat selalu, diberi umur yang panjang untuk melihat aku dan saudara-saudaraku meraih kesuksesan. Ayah dan Ibu terima kasih atas pengorbanan dan jerih payahnya sehingga aku dapat menggunakan toga dan gelar di belakang namaku”.

Serta

**“Almamaterku Tercinta Universitas Lampung”**

**MOTTO**

*“Harus Kuat Sampai Tamat”*

(Lusiana)

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Pemahaman Konsep Demokrasi Dengan Sikap Demokratis Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Menggala”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr, Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albert Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Ibu Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd. selaku dosen Pembahas I terima kasih atas masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya.
11. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang dengan rela dan ikhlas memberikan ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Seminar yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
13. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian
14. Kepada diriku sendiri, Terima kasih karena sudah kuat berusaha dan berjuang untuk terus berjalan maju meskipun banyak bebatuan diperjalanan dan perkataan yang meremehkan. Untuk diriku terima kasih ya kamu sudah kuat sampai tamat melewati berbagai tantangan, Kamu hebat.
15. Teristimewa untuk Ibuku, ibu Suharni yang paling cantik dan kuat sedunia. Terima kasih sudah merawatku, memberikan kasih sayang yang tulus, terima kasih sudah mau mendukung dan berjuang bersama-sama selama ini, terima kasih untuk setiap pengorbanan yang ibu berikan untuk Lusi, terima kasih untuk semua dukungan ibu untuk Lusi, terima kasih karena tetap kuat selama ini. Semoga Allah selalu memberikan ibu kesehatan, menjauhkan ibu dari segala macam bentuk bahaya, dan semoga Allah memberikan ibu rezeki yang

berlimpah, dan semoga kita selalu bersama dengan keimanan dan ketataan kepada Allah SWT.

16. Terima kasih untuk Ayahku yang Paling Ganteng dan Galak, Bapak Amri Norman Terima kasih untuk segala kerja keras yang sudah Ayah lakukan untukku dan saudara-saudaraku, Ayah yang kuat dan hebat selalu tak kenal lelah untuk memberikan yang terbaik untuk semua anaknya. Terima kasih Ayah karena telah menyayangiku, merawatku, terima kasih untuk segala perlindungan yang Ayah berikan untuk Lusi sehingga sampai saat ini Lusi tidak merasa kurang dengan apa yang dimiliki orang lain. Semoga Ayah selalu diberikan kesehatan agar dapat melihat Lusi memakai toga di hari yang kita nantikan dan meraih kesuksesan kelak dimasa depan.
17. Untuk kakak dan adikku tersayang, Atu Novia Apriyani, Acik Seprina Florida, Ses Nomika Safitri, dan Adikku Satria Adi Wijaya terima kasih atas semua doa, dukungan, motivasi, dan hiburan yang kalian berikan kepadaku disaat aku sedang lelah, letih dan lesu. Semoga kita dapat bersama-sama meraih kesuksesan.
18. Untuk Keponakanku tersayang Nico Fernanda, dan Nabil Ferdian yang selalu memberikan hiburan kepada ku saat aku sedang letih, lesu dan juga lelah.
19. Sepupu-sepupuku tersayang, Ane Lisa, Ayuk sela, Udo Algi, dan Yunda Linda terima kasih atas semangat yang kalian berikan untukku selama masa perkuliahan.
20. Keluarga besarku tersayang, Cim Eli, Holi Ardiansyah, Wak Lati, Menak Fikri, Papi Junaidi terima kasih atas semangat, doa maupun dukungan finansial dan segala usaha yang diberikan kepada ku untuk mendukungku selama masa perkuliahan.
21. Kakek dan Nenekku tercinta, Yayik Yaman, Alm. Andung Juhaiyah terima kasih sudah mendoakan aku untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dengan lancar, semoga kita dapat bertemu Andung di surganya Allah SWT, dan Yayik diberikan kesehatan agar dapat melihat Lusi memakai toga.
22. Terima kasih untuk sahabat dan orang-orang terbaik dalam hidupku yang sedang sama-sama berjuang berusaha untuk mendapatkan gelar sarjana, Novia Ristiani, Zahra Asiyfa, Sinta Permata Dewi, Elsha Rinatha, Sufi Sopan, untuk

segala dukungan, canda tawa, kebersamaan, dan ketulusan dalam persahabatan ini.

23. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Skripsi (Devia, Anggun, Carol, Inayah, Riska, Senji, Dewi, Alfina, Kukuh, Arief, Rizal, Afsa, Ayu, Evanti, Gita, Fitri, Wilya, Anisa, Chika, Fatimah) Atas segala motivasi, dukungan, dan arahan kalian semua dalam membantu saya menyelesaikan skripsi.
24. Teman Program Studi PPKn angkatan 2019 dan teman selama KKN (Puca, Dewi, Niken, Naomi, Aldo, Tedy, dan Iacun) terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT.

Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

Lusiana

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I . PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.6.2 Kegunaan Praktis .....	8
1.7 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.7.1 Ruang Lingkup Ilmu.....	9
1.7.2 Objek Penelitian .....	9
1.7.3 Subjek Penelitian .....	9
1.7.4 Tempat Penelitian .....	9
1.7.5 Waktu Penelitian.....	10
<b>II . TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Deskripsi Teori .....	11
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pemahaman Konsep Demokrasi .....	11
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Sikap Demokratis .....	35
2.2 Kajian Penelitian Relevan .....	43
2.3 Kerangka Berpikir .....	45
2.4 Hipotesis .....	47
<b>III . METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	48

3.2 Populasi dan Sampel.....	48
3.2.1 Populasi .....	48
3.2.2 Sampel .....	49
3.3 Variabel Penelitian .....	50
3.3.1 Variabel Bebas (X) .....	50
3.3.2 Variabel Terikat (Y) .....	50
3.4 Defisini Konseptual dan Operasional.....	50
3.4.1 Definisi Konseptual .....	50
3.4.2 Definisi Operasional .....	51
3.5 Rencana Pengukuran Variabel .....	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	53
3.7.1 Uji Validitas.....	53
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	55
3.8 Analisis Butir Soal.....	56
3.8.1 Taraf Kesukaran.....	56
3.8.2 Daya Beda.....	57
3.9 Teknik Analisis Data .....	57
3.9.1 Analisis Distribusi Frekuensi.....	58
3.9.2 Uji Hipotesis .....	59
<b>IV . HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Langkah-Langkah Penelitian.....	61
4.1.1 Persiapan Pengajuan Judul .....	61
4.1.2 Penelitian Pendahuluan.....	61
4.1.3 Pengajuan Rencana Penelitian.....	62
4.1.4 Penyusunan Alat Pengumpulan Data .....	62
4.1.5 Pelaksanaan Uji Coba Angket .....	63
4.1.6 Analisis Butir Soal.....	69
4.2 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	70
4.2.1 Profil SMA Negeri 1 Menggala.....	70
4.2.2 Visi Misi SMA Negeri 1 Menggala.....	71
4.2.3 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Menggala.....	72
4.2.4 Daftar Tenaga Pendidik SMA Negeri 1 Menggala .....	72
4.3 Deskripsi Data Penelitian .....	73
4.3.1 Pengumpulan Data.....	73
4.3.2 Penyajian Data .....	73
4.4 Uji Hipotesis.....	89
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	92
4.5.1 Pemahaman Konsep Demokrasi (Variabel X).....	92
4.5.2 Sikap Demokratis (Variabel Y) .....	101
4.5.3 Hubungan Pemahaman Konsep Demokrasi Dengan Sikap Demokratis.....	109
4.6 Keterbatasan Penelitian .....	112
<b>V . KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran .....	115

5.2.1 Bagi Peserta Didik .....	115
5.2.2 Bagi Pendidik .....	115
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	115

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Jumlah Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Menggala.....	49
Tabel 3. 2 Jumlah Sampel Penelitian .....	49
Tabel 3. 3 Indeks Koefisien Reliabilitas .....	55
Tabel 3. 4 Klasifikasi Tingkat Kesukaran.....	56
Tabel 3. 5 Kategori Daya Beda.....	57
Tabel 3. 6 Interpretasi Nilai r .....	59
Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Tes (Variabel X) Kepada 10 Responden diluar populasi.....	64
Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Angket (Variabel Y) Kepada 10 Responden diluar populasi.....	65
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas (Variabel X) kepada Sepuluh Responden diluar Populasi .....	67
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas (Variabel Y) kepada Sepuluh Responden diluar Populasi .....	68
Tabel 4.5 Uji Taraf Kesukaran.....	69
Tabel 4.6 Uji Daya Beda Soal.....	70
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Menggala.....	72
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Menerjemahkan Makna Demokrasi.....	75
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Menginterpretasikan prinsip Demokrasi.....	76
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Indikator Mengeksplorasi nilai Demokrasi .....	77
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Akumulasi Pemahaman Konsep Demokrasi (Variabel X).....	78
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Hasil Tes .....	79

Tabel 4.13 Rekapitulasi Data Nilai Hasil Tes .....	80
Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Indikator Berpartisipasi Aktif di Sekolah.....	81
Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Indikator Ikut Serta dalam Musyawarah di Sekolah .....	83
Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Indikator Bertanggung jawab atas Tugas yang diberikan .....	85
Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Mengemukakan Pendapat dan Menerima Pendapat Orang lain.....	86
Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi Sikap Demokratis (Variabel Y) .....	88
Tabel 4.19 Hasil Uji Korelasi Menggunakan SPSS 22 .....	90
Tabel 4.20 Pedoman Derajat Hubungan .....	91

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	46

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di setiap negara hampir seluruhnya menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Namun dalam praktiknya tetap berbeda-beda satu sama lain.

Konsep mengenai demokrasi ini diterima hampir seluruh negara yang ada, hal ini disebabkan karena kepercayaan bahwa konsep demokrasi merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang memberikan kedaulatan berada pada tangan rakyat. Dalam demokrasi seluruh rakyat memiliki hak yang dan setara dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat itu sendiri (Astawa, 2017). Demokrasi memberikan kebebasan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung

dan tidak langsung dan melalui perwakilan untuk ikut serta dalam rumusan, perancangan, dan pembuatan kebijakan yang ada. Dalam demokrasi mencakup kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan juga budaya yang menjadi awal adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan yang selama ini diyakini paling menjanjikan.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau sikap hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai prinsip sebuah sistem sosial dan politik yang paling baik saat ini demokrasi menjanjikan solusi terbaik bagi perbaikan tatanan masyarakat Indonesia. Kemajemukan Indonesia dapat menjadi modal sosial demokrasi yang potensial bagi pengembangan demokrasi, sekalipun demokrasi bukanlah hal baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang telah menganut sistem pemerintahan yang berubah-ubah. Namun sistem pemerintahan yang masih bertahan sejak era reformasi tahun 1998 hingga saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia menganut sistem pemerintah demokrasi berarti mengutamakan adanya kepentingan rakyat.

Dalam konsep demokrasi selain berkedaulatan rakyat, demokrasi juga dijadikan sebagai sikap hidup. Sikap hidup yang sesuai dengan demokrasi berarti dapat tercermin dari adanya partisipasi dari setiap masyarakat untuk membentuk kebijakan yang mengandung nilai-nilai untuk mengatur kehidupan.

Dengan demikian maka demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan maupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat.

Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Oleh karena itu, selalu ditekankan bahwa peranan rakyat yang senyatanya dalam

proses politik berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama: pertama, tahap untuk memilih; kedua, tahap pengambilan keputusan.

Demokrasi sebagai sikap hidup didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi dalam setiap negara berbeda-beda. Budaya demokrasi Indonesia mengacu pada akar nasionalisme yang mengandung nilai, persatuan, gotong royong, dan mengutamakan kepentingan umum, serta menghargai hak orang lain. Tanggung jawab dan toleransi juga merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem pemerintahan demokrasi.

Sistem demokrasi dapat dipandang sebagai norma, aturan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemahaman akan demokrasi tidak hanya dilihat dari sudut pandang politik saja tetapi juga membentuk sikap hidup dalam masyarakat. Dengan adanya penerapan sistem demokrasi pemerintah dapat mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengelola masyarakat, begitu pula dengan masyarakat yang dapat mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah demi kesejahteraan bersama. Hendaknya pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Adlin dan Syafri (2012) menyatakan untuk membangun sistem politik yang demokratis juga memerlukan perbaikan budaya politik pada tingkat individu, baik pada tataran elit maupun massa yang meliputi sikap-sikap dan perilaku para aktor yang terlibat didalam sistem politik tersebut.

Demokrasi membutuhkan partisipasi dan usaha nyata dari setiap masyarakat maupun pemerintah negara untuk berperilaku saling toleransi, gotong royong, saling menghargai, dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga saling mendukung pemerintah dalam sistem politik demokrasi. Perilaku-perilaku yang dapat mendukung demokrasi tersebut tentunya perilaku demokrasi (Winarno, 2014).

Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak selamanya akan berjalan baik tanpa ada hambatan, tentunya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham akan konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan terlebih lagi sebagai sikap hidup. Hal ini menyebabkan kekeliruan yang terjadi dalam demokrasi sehingga kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam demokrasi, bukan hanya tentang kegiatan memilih pemimpin rakyat secara langsung melainkan dalam arti sebagai sikap hidup. Hidup yang sesuai dengan demokrasi berarti melandaskan nilai-nilai demokrasi sebagai dasar dalam pergaulan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Seharusnya masyarakat Indonesia lebih aktif dalam pengambilan kebijakan, serta partisipasinya dalam masyarakat, terlebih lagi sikap toleransi dan menghargai pendapat dan hak orang lain. Dengan demikian maka demokrasi akan benar-benar terlaksana dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan sistem demokrasi ini namun sistem ini masih tetap dipertahankan di Indonesia. Indonesia terus menerus memperbaiki sistem demokrasi melalui masyarakat sebagai pemeran utama demokrasi.

Salah satu cara untuk memperbaiki kekurangan demokrasi adalah dengan memperbaiki pemahaman mengenai konsep demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan berperan untuk memproses semua aspek kepribadian manusia yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh manusia (Arifin, 2021). Hakikat dari pendidikan ialah mengembangkan pengetahuan, kecerdasan, nilai, pola tingkah laku peserta didik sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang demokrasi. Dengan demikian nilai-nilai demokratis hendaknya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan.

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tidak hanya menuntut mengembangkan kemampuan akademik saja, tetapi juga mengembangkan kompetensi moral, sosial, serta keterampilan. Oleh sebab itu, dalam dunia pendidikan PPKn adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki peran untuk

menjadikan dan menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akan demokrasi.

Kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah, yang dimaksud kesadaran dan wawasan kebangsaan mencakup: a) Sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, b) meningkatkan kualitas diri, c) sadar dan memiliki wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme, dan bela negara, d) menghargai HAM, keberagaman bangsa, dan kesetaraan gender, e) mengembangkan demokrasi, f) bertanggung jawab, g) taat hukum, h) membayar pajak, i) bersikap anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Dari Sembilan aspek tersebut jelas bahwa demokrasi menjadi salah satu aspek wawasan dan kesadaran yang harus dimiliki peserta didik mengenai status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terdapat dalam kajian materi PPKn.

Pengembangan demokrasi adalah materi yang menginformasikan, menanamkan, mengembangkan, serta mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Suasana pendidikan maupun program pendidikan di sekolah pada dasarnya berpengaruh terhadap pengembangan sikap peserta didik. Materi demokrasi yang ada dalam mata pelajaran PPKn dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman demokrasi yang disertai dengan sikap demokratis siswa. Tujuannya adalah agar mencegah siswa melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini sesuai dengan misi mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara yang

paham dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Artinya, adanya pembelajaran demokrasi akan membentuk pola perilaku siswa untuk memiliki sikap demokratis.

Dengan demikian, pemahaman konsep demokrasi dalam PPKn diharapkan mampu mendorong siswa melakukan hal positif dan sikap demokratis sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

Namun kenyataannya masih banyak siswa yang belum paham akan konsep demokrasi sehingga siswa tidak memiliki sikap demokratis. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa di SMA Negeri 1 Menggala, seperti pada kegiatan pemilihan ketua OSIS yang memperoleh suara sah sebanyak 640, tetapi suara yang tidak sah mencapai 144 dan jumlah golput sebanyak 72. Selain kegiatan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas tidak dilaksanakan dengan voting melainkan secara aklamasi. Dua hal tersebut merupakan wujud dari kurangnya pemahaman dan kesadaran akan demokrasi, padahal kegiatan pemilu dan voting merupakan salah satu wujud demokrasi. Selain itu nilai demokrasi semakin luntur hal ini terlihat dari data jumlah siswa yang berkelahi akibat berbeda pendapat, tidak menghargai orang lain, dan meremehkan orang lain. Dalam proses pembelajaran pun masih banyak siswa yang ingin menang sendiri, kurang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan guru, serta masih banyak siswa yang tidak berperan aktif ketika berdiskusi kelompok. Tampak pula dari rata-rata nilai, materi demokrasi memperoleh nilai rata-rata yang sangat rendah yaitu 55 dengan skala 0-100. Dapat disimpulkan bahwa masih ada siswa yang mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran PPKn, khususnya dalam materi demokrasi.

Kasus perkelahian berkelompok dan sikap lain yang tidak sesuai dengan ketentuan kerap terjadi pada siswa di sekolah ini, sehingga catatan dalam buku guru BK menjadi sangat banyak. Dapat disimpulkan bahwa masih ada

siswa yang mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran PPKn, khususnya dalam materi demokrasi.

Dari berbagai permasalahan tersebut terlihat bahwa sikap demokratis siswa di SMA Negeri 1 Menggala belum sesuai dengan apa yang diharapkan, padahal sikap yang sesuai dengan demokrasi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga semua keinginan, kepentingan, dan juga pendapat yang berbeda-beda dapat dipersatukan. Sikap demokratis di Indonesia perlu untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tetap mengacu pada nilai budaya bangsa yang memiliki nilai gotong royong serta mementingkan kepentingan umum (Juliardi, 2015). Sikap ini memang harus ditanamkan sejak dini, agar tidak akan terjadi kekeliruan masyarakat terhadap demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memperoleh bukti tentang hubungan antara pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Masih rendahnya pemahaman konsep demokrasi siswa
2. Masih terdapat siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah
3. Sikap demokratis siswa semakin menurun
4. Siswa tidak sadar akan hak dan kewajibannya sebagai peserta didik

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah yang akan diteliti, agar penelitian jelas dan berjalan dengan baik, yakni pada masalah kurangnya pemahaman konsep demokrasi masyarakat menyebabkan sikap demokratis dalam diri masyarakat rendah. Berikut adalah pembatasan

masalah yang akan pada “Hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala?”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan serta mendeskripsikan “Hubungan antara pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala”.

#### **1.6 Kegunaan Penelitian**

##### **1.6.1 Kegunaan Teoritis**

1. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sikap demokratis siswa khususnya di SMA negeri 1 Menggala, Kabupaten Tulang Bawang
2. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi siswa umumnya mengenai hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis

##### **1.6.2 Kegunaan Praktis**

1. Guru

Dapat memberikan masukan bagi pendidik untuk berperan serta menumbuh kembangkan sikap demokratis melalui pembelajaran dan pemahaman konsep demokrasi.

## 2. Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemberi informasi akan pentingnya pemahaman konsep demokrasi bagi generasi muda agar dapat menumbuhkan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.7.1 Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pendidikan politik dan kenegaraan khususnya tentang urusan politik yang mencakup demokrasi, karena mengkaji tentang sikap demokratis dalam lingkungan masyarakat.

#### **1.7.2 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah sikap demokratis siswa dalam lingkungan sehari-hari di sekolah.

#### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek Dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala

#### **1.7.4 Tempat Penelitian**

Tempat dari penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Menggala, Jl. Cendana No.5 Gunung Sakti, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

### **1.7.5 Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 17 Januari 2023 dengan Nomor: 415/UN26.13/PN.01.00/2023 dan penelitian ini selesai pada tanggal 3 Februari 2023 dengan Nomor: 1007/UN26.13/PN.01.00/2023.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Deskripsi Teori**

#### **2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pemahaman Konsep Demokrasi**

##### **1. Pemahaman Konsep**

Pemahaman ditinjau dari bahasa berasal dari kata dasar “Paham”, yang bermakna mempunyai pengetahuan luas terhadap suatu hal, sedangkan pemahaman merupakan kegiatan memahami suatu permasalahan yang tergantung dengan pemikiran individu tersebut. Pemahaman merupakan suatu proses aktif yang terjadi dalam diri individu saat menghubungkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama melalui koneksi fakta (Radiusman, 2020). Menurut Bloom pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap informasi atau makna dari sebuah materi yang dipelajari, jadi seberapa besar siswa mampu untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan (Susanto, 2013). Pemahaman juga diartikan sebagai kemampuan dalam menangkap arti suatu materi yang sudah dipelajari contohnya seperti seseorang yang menafsirkan informasi, dan menghubungkan sebuah peristiwa maupun kegiatan lainnya yang sejenis.

Suharsimi Arikunto (2005) menyatakan, Pemahaman adalah membedakan, mempertahankan, menerangkan, menyimpulkan memberikan contoh, dan juga memperkirakan, sehingga dengan pemahaman seorang individu diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan antara fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini pemahaman menghendaki seseorang bukan hanya mengerti tetapi juga menggunakan konsep yang dimengerti itu dengan efektif. Menurut Dilthey dalam (Ristiani, 2011) “pemahaman” merupakan pengertian mengenai kerja akal pikiran manusia, yang membentuk hubungan berbagai macam persoalan dalam sebuah pola.

Kegiatan pemahaman ini dibagi menjadi beberapa proses kognitif antara lain menguraikan permasalahan, mendemonstrasikan, mengkategorikan, merumuskan, dan juga memberi kesimpulan, serta membandingkan sesuatu dan terakhir menjelaskannya. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu proses, perbuatan dan kemampuan menangkap makna serta penguasaan terhadap materi/bahan yang dipelajari. Pemahaman menaruh dasar suatu kegiatan belajar, tanpa hal tersebut maka suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan tidak akan bermakna serta proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik membawa hasil yang maksimal.

Pemahaman memiliki tingkatan yang berhubungan dengan ranah kognitif dan peningkatan kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif. Taksonomi Bloom menyatakan bahwa aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan (Ristiani, 2011). Adapun masing-masing tingkatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengingat, berarti mengambil informasi yang relevan dari ingatan jangka Panjang

2. Memahami, berarti merekonstruksikan makna dari berbagai pesan instruksional
3. Menerapkan, berarti melaksanakan suatu prosedur
4. Menganalisis, berarti menguraikan materi menjadi bagian-bagian yang menghubungkannya
5. Mengevaluasi, berarti membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu
6. Menciptakan, berarti membuat konsep berdasarkan kriteria dan menyatukan berbagai elemen untuk membentuk sebuah pola atau struktur baru

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan siswa dalam aspek kognitif mulai dari jenjang mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai menciptakan. Kemampuan kognitif pada peserta didik dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pemahaman materi selanjutnya.

Konsep merupakan suatu unit dasar yang terbentuk lewat pengetahuan, pola hubungannya digunakan untuk mengelompokkan objek kedalam suatu kategori. Fichte mendefinisikan konsep adalah sebuah intuisi yang menjadi dasar sebagai suatu kegiatan pasif menjadi aktif, sehingga pemahaman konsep merupakan pemahaman yang dibangun dari pengetahuan factual yang berfungsi membangun hubungan konsep yang ada (Radiusman, 2020). Pemahaman terhadap konsep dapat membantu siswa untuk menyederhanakan, merangkum dan mengelompokkan informasi. Pemahaman konsep memiliki peran yang penting dalam pengetahuan matematika. Penekanan terhadap konsep dapat membuat siswa untuk memperoleh konsep yang permanen yang diperoleh melalui pengalaman sehingga siswa mampu menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain (Ansari, 2016:38).

Dalam memahami konsep juga dapat dilakukan melalui cara eksplorasi pengetahuan lebih mendalam dan memberikan konsep yang sesuai dan menyenangkan (Santrock, 2011). Kegiatan yang eksploratif ini dilakukan oleh siswa supaya siswa tidak lagi menghafal sebuah konsep tetapi justru dapat memahami konsep tersebut seutuhnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkatan Pemahaman**

Menurut Kuswana, jenis-jenis perilaku pemahaman berdasarkan pada tingkat kepekaan dan kemampuan memahami materi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. Menerjemahkan (*Translation*), berarti dapat mengalihkan dari bahasa yang satu ke dalam bahasa lainnya sesuai dengan pemahaman yang didapat dari konsep materi. Atau dapat juga diartikan sebagai konsep abstrak yang mempermudah orang untuk mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan arti *Bhinneka Tunggal Ika*, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain.
2. Interpretasi (*Interpretation*), kemampuan ini lebih luas daripada hanya menerjemahkan, menafsirkan berarti kemampuan untuk mengenal, dan memahami yang dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya menghubungkan antara nilai demokrasi dengan kondisi yang diterapkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3. Mengeksplorasi (*Exploration*), dalam mengeksplorasi dibutuhkan kemampuan intelektual yang tinggi, sebab seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang telah tertulis. Membuat perkiraan mengenai konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, maupun permasalahan.

Ketiga tingkatan pemahaman tersebut sering kali sulit untuk dibedakan, hal ini tergantung kepada isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahamannya, seseorang akan melewati tingkatan secara berurutan.

Menurut Wahyudi dalam (Ristiani, 2011) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkatan pemahaman bagi peserta didik agar mencapai peningkatan pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Usia peserta didik (tingkat sekolah, SD, SMP, SMA)
2. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran
3. Motivasi peserta didik menjadi salah satu faktor karena motivasi mendorong peserta didik untuk giat dalam proses pembelajaran

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pencapaian tingkat pemahaman pada peserta didik tergantung pada dirinya sendiri dalam mempelajari konsep suatu materi, motivasi siswa, dan pendekatan pendidik dalam proses pembelajaran maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman peserta didik dan sebaliknya.

### **3. Definisi Demokrasi**

Secara etimologis demokrasi terdiri atas dua kata dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*cratos*" yang berarti kedaulatan atau kekuasaan (Zuliyah, 2016). Jadi secara bahasa berarti demokrasi adalah kedaulatan dalam sebuah negara berada di tangan masyarakatnya atau rakyat. Demokrasi memiliki banyak

terminology, diantaranya berhubungan dengan aturan manusia, kelompok, partai, aturan umum, partisipasi politik, kompetisi para elite, pluralism, sosial dan politik, persamaan hak, kebebasan, dan lain-lain. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak dapat terlepas dari adanya politik didalamnya. Sebab demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat yang menempatkan hak politik rakyat dalam suatu asas tampak didalam teori hukum alam. Hal ini berdasarkan pada pemikiran dua filsuf besar yakni John Locke dan Montesquieu yang memberikan gagasan besar mengenai demokrasi. Dalam teorinya John Locke beranggapan bahwa hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, hak memiliki (*live, liberty, property*). Sedangkan menurut Montesquieu sistem pokok yang dapat menjamin hak politik tersebut ialah "*Trias Politica*" yaitu pembatasan kekuasaan menjadi tiga bagian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing dipegang oleh satu orang. Dari pemikiran dua filsuf tersebutlah muncul konsep demokrasi yang berkaitan erat dengan peran negara dan peran masyarakat.

Tak hanya dua filsuf tersebut yang berpendapat tentang demokrasi, beberapa ahli ikut memberikan teori mengenai demokrasi, Samuel P. Huntington mengartikan demokrasi sebagai keputusan kolektif dan berkedudukan kuat yang dibuat oleh individu yang telah dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala (Nugroho, 2013).

Joseph A. Schumpeter memandang demokrasi melalui sudut pandang yang berbeda. Schumpeter melihat demokrasi sebagai suatu "metode". Menurutnya, demokrasi tidak lain adalah sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik. Di mana setiap individu memiliki hak membuat keputusan melalui perjuangan yang

kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Nugroho, 2013). Aristoteles menuliskan konsep mengenai demokrasi:

Syarat dasar sebuah negara demokrasi adalah kebebasan yang hanya dapat dinikmati oleh negara tersebut. Hal ini yang disebut dengan tujuan utama dari demokrasi. Prinsip kebebasan merupakan milik dari semua masyarakat baik yang memerintah maupun diperintah sesungguhnya merupakan keadilan demokrasi (Raimundus, 2020).

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana pendapat dari beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Sidney Hook dalam (Mahfud, 2010) demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana kebijakan pemerintah diambil berdasarkan kesepakatan yang diberikan oleh rakyat secara bebas.
- b. Menurut Henry B Mayo dalam (Azyumardi Azra, 2000) berpendapat bahwa demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang menunjukkan kebijakan umum ditetapkan atas dasar pendapat bersama yang dikontrol secara efektif oleh rakyat melalui pemilihan berkala berdasarkan prinsip kebebasan politik. Dengan kata lain demokrasi memiliki fungsi sebagai pengendali rakyat atas proses pembuatan kebijakan secara kolektif dan mempunyai kesetaraan hak dalam mengendalikan hal tersebut.
- c. Joseph A. Schemer menyatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif dari suara rakyat.
- d. Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Nugroho, 2017).
- e. Charles Costello, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara (Nasution, 2016).

Dengan demikian rakyatlah yang memiliki kekuasaan terhadap konsep demokrasi. Menurut Harris Soche (Nugroho, 2017) demokrasi adalah wujud pemerintahan rakyat, oleh karena itu kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi seluruh rakyat. Kemudian menurut Lincoln demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politik berada ditangan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Gregorius Sahdan 2004). Oleh sebab itu, pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang mendapatkan amanat dari rakyat untuk menjalankan segala kepentingan rakyat yang disebut dengan *government by people*. Selanjutnya Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl berpendapat demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mewajibkan pemerintah agar bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan suara rakyat (Dwi Sulisworo, 2012).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada kekuasaan rakyat. Demokrasi tidak hanya tentang pemerintahan saja, melainkan juga mengenai gaya hidup dan tata cara dalam masyarakat di lingkungan sehari-hari, yang tentunya mengandung unsur-unsur moralitas. Menurut Ahmad Syafi'I Maarif, demokrasi bukanlah suatu wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun secara cepat, melainkan demokrasi berproses yang cukup Panjang, dimana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik (Nasution, A.R. 2016).

Demokrasi sebagai nilai dan juga sikap hidup sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur tentang kehidupan bersama dalam keberagaman

sehingga menjadi sebuah rasa kepercayaan yang satu dengan lainnya. Ada tiga hal yang masuk dalam konsep demokrasi yakni pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal (Dahl, 1989) mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik yaitu, 1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif, 2) partisipasi yang efektif bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, 3) keterbukaan terhadap kebenaran bagi semua orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik, 4) kontrol terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus diputuskan melalui proses pemerintahan, 5) pencakupan yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam definisi lain Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses rumusan kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan jaminan persamaan perlakuan dari negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi. Sejalan dengan pendapat Dahl tersebut April Carter mendefinisikan demokrasi secara ringkas ialah pembatasan kekuasaan (April Carter, 1985). Robert Dahl juga menjelaskan bahwa yang terpenting dalam sistem demokrasi ialah bagaimana masyarakat dapat mengimplementasikan hak-hak nya dalam bentuk kebebasan mengemukakan pendapat, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi dalam pelaksanaan politik.

Demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multi dimensional yaitu secara filosofis demokrasi merupakan ide, norma, prinsip, kemudian secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara

psikologis sebagai wawasan, sikap, dan juga perilaku individu dalam hidup bermasyarakat (Danan, 2017). Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai suatu jenis sistem pemerintahan maupun sebagai suatu sistem politik dengan konsep kedaulatan berada di tangan rakyat, penguasa mempertanggung jawabkan secara berkala terhadap yang dipimpinnya. Akan tetapi, demokrasi juga dimaknai sebagai tata cara hidup, kemauan untuk berdiskusi, toleransi, dan juga kesediaan mendengarkan dan mengungkapkan pendapat dari orang lain menuju kehidupan yang memiliki kesetaraan yang begitu besar.

Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap warga negara, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti halnya dengan Teori Demokrasi Dewey (1916/1996) mengatakan bahwa demokrasi adalah model kehidupan sosial yang tidak hanya berbicara soal politik *an sich*. Demokrasi dalam implementasinya membutuhkan peran dan kerja sama semua pihak, seperti institusi sosial, lembaga politik, ekonomi, lembaga pendidikan, saintis, lembaga agama artistik dan semua warga dalam sebuah negara. Inilah demokrasi dalam sudut yang komprehensif dan bersifat integratif konektif antara yang satu dengan yang lainnya. Demokrasi merupakan prinsip pertama dan paling utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik.

Demokrasi adalah konsep politik yang menjadi pilihan sistem politik diberbagai negara di dunia. Konsep demokrasi ini dianggap mampu dan nyata untuk mengatasi masalah sosial politik yang dihadapi berbagai negara.

Agar akselerasi praktek demokratisasi dapat ditingkatkan, maka perlu upaya-upaya konkrit yang harus dilakukan, diantaranya adalah penanaman atas pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual ditingkatkan, pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, perbaikan kinerja parlemen dan peningkatan kepekaan pemerintah. Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi harus selalu belajar dan melakukan pembenahan disegala bidang. Kelemahan yang terjadi selama satu dekade proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini maka praktek demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dapat direalisasi dan kegagalan demokrasi dapat dihindari.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah karya ciptaan manusia yang diawali dengan adanya ide, yang kemudian menjadikan peraturan atau kebijakan lewat moral yang mengikat, menjadikan sebuah prinsip suatu sistem sosial, sehingga menciptakan sebuah pengetahuan, yang kemudian pengetahuan itu dijadikan sikap dan perilaku dalam kehidupan dalam masyarakat. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat dari demokrasi yang di laksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan yang lebih adil dalam aspek kehidupan. Maka dari itu. Negara demokrasi yaitu negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian konsep demokrasi dalam pembelajaran PPKn dapat mendorong peserta didik melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam permasalahan kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah yang akan menentukan nasib kehidupan negara. Oleh sebab itu, negara yang menganut sistem

demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat atas persetujuan setiap individu sendiri karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Negara dikatakan berhasil dalam menerapkan pelaksanaan demokrasi dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara komperhensif, kriteria demokrasi dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz, dan Henry B. Mayo. Gwendolen M. Carter dan John H. Herz dalam (Budiardjo, 1975) mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan melalui prinsip:

- a. Pembatasan tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk menyusun pergantian pemimpin secara berkala
- b. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berbeda
- c. Hak yang sama didepan hukum tanpa membedakan kedudukan politik
- d. Adanya pemilihan yang bebas damai disertai perwakilan yang efektif
- e. Adanya kebebasan berpartisipasi bagi semua partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, serta kelengkapan seperti media massa
- f. Penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya
- g. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan diatas kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat dijadikan tolak ukur. Menurut Franz Magnis Suseso ada lima

ciri negara demokrasi, yaitu: 1) negara hukum, 2) pemerintah, 3) pemilihan umum yang bebas, 4) prinsip mayoritas, dan 5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Demokrasi dianggap sebagai media untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur. Jikalau demokrasi ditegakkan dengan tingginya partisipasi rakyat dalam politik, ekonomi, sosial-budaya maka akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Terdapat syarat minimum yang harus dimiliki sebuah rezim yang mengaku demokratis, yaitu adanya keterwakilan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan kebijakan, adanya komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial, dan syarat yang terakhir ialah masyarakat diberikan ruang agar berpartisipasi aktif sebagai subjek demokrasi.

#### **4. Pemahaman Demokrasi**

Secara konstitusional demokrasi menjadi sistem pemerintah dan merupakan konsep yang harus dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebab pemahaman akan demokrasi ini menjadikan warga negara sadar akan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia terkhusus pemahaman demokrasi perlu untuk ditingkatkan agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Kemampuan seseorang dalam memahami makna dan prinsip-prinsip demokrasi sangat diperlukan untuk membentuk pemahaman demokrasi dalam masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi menurut Sukarna ialah:

1. Kedaulatan berada ditangan rakyat  
Artinya kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan berada di tangan rakyat, dan kehendak rakyat yang akan menentukan kebijakan untuk rakyat itu sendiri
2. Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia  
Pengakuan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa membeda-bedakan baik suku,

agama, ras, dan lain-lain. Di Indonesia aturan mengenai hak asasi manusia dalam Tap MPR dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pemerintahan yang berdasarkan Hukum  
Pemerintahan dengan dasar hukum (konstitusi) bermakna bahwa pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugasnya tersebut dikendalikan serta dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi (hukum dasar).
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak  
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan yang diberikan hakim untuk masyarakat Indonesia semuanya sama.
5. Pemerintahan atas dasar diskusi (musyawarah)  
Dalam menentukan sebuah kebijakan maupun keputusan harus dilakukan dengan cara berdiskusi bersama (musyawarah) agar tercapai mufakat.
6. Ada Partai politik dan organisasi politik  
Dalam hal ini partai politik harus lebih dari satu dan menjalankan fungsinya dengan baik, terutama penyaluran aspirasi rakyat.
7. Pemilihan umum yang bebas  
Pemilihan umum adalah bentuk pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan diselenggarakannya pemilu adalah memilih wakil rakyat guna membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan mendapat dukungan rakyat. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat

untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai demokrasi secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera (Udin S. Winataputra, 2002).

Berdasarkan pendapat tentang pemahaman demokrasi di atas, maka dapat dirumuskan pemahaman demokrasi adalah kemampuan menangkap makna dan arti dari demokrasi dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Seseorang yang paham akan konsep demokrasi tentunya dapat dilihat dari; 1) menerjemahkan makna demokrasi 2) menginterpretasikan prinsip demokrasi, 3) mengeksplorasi nilai demokrasi (Ristiani, 2011).

## **5. Unsur Penegak Demokrasi**

Demokrasi tidak akan berjalan sebagai sistem pemerintahan tanpa adanya unsur penegaknya. Unsur-unsur penegak demokrasi antara lain:

### **1. Negara Hukum**

Istilah negara hukum mengandung makna bahwa negara memberikan perlindungan hukum untuk seluruh warga melalui lembaga-lembaga peradilan yang bebas dan tidak berpihak, serta menjamin adanya hak azasi manusia. Sementara itu, di Indonesia istilah negara hukum dapat dilihat dari penjelasan

UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Oleh sebab itu jelas bahwa sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia didukung adanya hukum.

## 2. Masyarakat Madani

Masyarakat madani identik dengan adanya keterbukaan yang bebas dari adanya pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Selain itu masyarakat madani juga memiliki karakter kritis dan juga berpartisipasi aktif. Salah satu unsur berdirinya demokrasi ialah masyarakat madani yang bertindak sebagai kontrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif. Masyarakat madani (*Civil Society*), mensyaratkan adanya *civic gagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial.

Masyarakat madani dan demokrasi, bagi Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan (Rangkuti, 2018). Sebab dalam masyarakat madani, setiap masyarakat memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Menurut Winaputra keterampilan kewarganegaraan mencakup komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh warganegara antara lain keterampilan intelektual, keterampilan sosial, keterampilan partisipatif (Winatapura, 2002).

Komponen ini meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan. Ciri-ciri watak kemasyarakatan antara lain seperti semangat kemasyarakatan, sopan santun, rasa hormat terhadap peraturan hukum, berpikir kritis, hasrat untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi sangat diperlukan bagi keberhasilan demokrasi. Ketiga komponen itu merujuk pada ciri kepribadian masyarakat yang diperlukan bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi.

### 3. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik ini terdiri atas partai politik, kelompok penggerak, dan kelompok penekan. Menurut Mirriam Budiardjo fungsi partai politik adalah: a) sebagai sarana komunikasi, b) sarana sosialisasi, c) sarana rekrutmen politik, d) sarana pengatur konflik (Rangkuti, 2018).

### 4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers memiliki peran dalam kehidupan demokrasi yakni di bagian informasi dan publikasi. Di lain pihak juga pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Selain itu, dewan pers juga sebagai mediator, sebagai mediator antara penerbitan pers dan masyarakat, dewan pers pun bersikap independen dan adil.

## 6. Demokrasi Modern

Berbagai makna yang beragam mengenai demokrasi, namun di era modern seperti saat ini demokrasi cenderung ditekankan pada makna bahwa didalam konteks politik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Dalam wacana politik modern, demokrasi dimaknai oleh Abraham Lincoln tahun 1863 “*government of the people by the people for the people*” yang berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Konsep demokrasi dapat dipelajari berdasarkan pada dua aliran, yakni demokrasi liberal dan demokrasi sosialis/komunis. Konsep demokrasi liberal ini dicirikan dengan adanya kebebasan penuh terhadap individu, namun kekuasaan pemerintahan dibatasi kekuasaannya oleh pemerintah, dan sering disebut sebagai demokrasi konstitusional. Sesuai dengan pemikiran dasar dari komunisme, negara memerankan fungsi penting untuk menegakkan stabilitas sosial politik. Para pemegang kekuasaan menganggap dirinya sebagai wakil suatu gerakan yang mengusahakan dirinya sebagai

wakil suatu gerakan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Ciri demokrasi sosialis adalah sebagai berikut (1) Urusan publik diatur oleh kelompok atau dewan yang diorganisasikan dalam struktur piramida. (2) Pegawai pemerintah, penegak hukum, administrator merupakan subyek yang sering dipilih. Mereka mendapat mandat dari komunitas dan mandat tersebut bisa dicabut. (3) Pegawai publik dibayar tidak lebih dari upah pekerja. (4) Milisi rakyat untuk mempertahankan struktur politik baru yang tetap dikendalikan oleh komunitas. Demokrasi komunis bercirikan: (1) pemerintah dan politik dalam semua bentuk memberikan jalan untuk pengaturan pribadi; (2) semua urusan publik diatur secara kolektif; (3) konsensus sebagai prinsip pembuatan keputusan bagi semua permasalahan publik; (4) penyaluran tugas administrasi yang tersisa dilakukan dengan rotasi atau pemilihan; (5) penggantian semua pasukan tentara dilakukan dengan monitoring secara pribadi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep liberal lebih menekankan pada elemen-elemen procedural bagi sebuah struktur demokratis, sedangkan demokrasi komunis lebih menekankan pada elemen-elemen substantif.

#### Konsep Penting Demokrasi:

##### 1. Konsep Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan konsep modern yang terus menerus mengalami perkembangan negara-negara bangsa dan pencarian format hukum nasional yang lebih berkepastian, positivistic, dan seluler di Eropa Barat sejak abad ke-18. Konsep ini kemudian memperoleh rumusannya yang lebih pasti pada akhir abad ke-19 dengan terbentuknya dua negara Republik lewat dua revolusi, yakni revolusi kemerdekaan Amerika Serikat 1776, dan revolusi Perancis 1789 (Wignjosoebroto, 2006).

## 2. Karakteristik Warga

Warga adalah manusia-manusia yang bebas, artinya tidak terikat oleh peraturan hidup yang ada, yang boleh dibatasi hanya atas dasar kesepakatan-kesepakatan dengan sesamanya. Selain itu, warga juga memiliki kesamaan martabat dan derajat sesama manusia dalam kehidupan bernegara yang dikenal dengan kegiatan politik sejalan dengan hak-hak warga yang disebut sebagai hak-hak manusia yang asasi.

## 3. *Civil Society*

Adalah suatu bentuk masyarakat ideal di mana di dalamnya tak dikenal adanya diskriminasi antara mereka yang berstatus "yang dipertuan": dengan segala hak-hak istimewanya dan mereka yang berstatus " yang diperhamba" dengan segala macam beban kewajiban. Masyarakat warga adalah suatu masyarakat ideal yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang diakui berkedudukan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Mereka ini adalah warga-warga yang berkesetaraan, sama-sama berkebebasan dan berkeberdayaan.

## 4. *Political Citizenship*

Konsep yang menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik, yang tak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak akan tetapi juga jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga, terakutinya sebagai hak-hak mereka yang asasi, untuk berperan serta dalam setiap kegiatan politik. Dalam *political citizenship* ini tersirat adanya tanggungjawab moral para warga untuk tidak menyalahgunakan hak azasinya. Hak tidaklah semestinya dibiarkan "menganggur" tanpa dimanfaatkan.

## 5. *Social Citizenship*

Adalah konsep mutakhir yang mulai banyak dikenal dalam perkembangan konsep *welfare state*. Dalam konsep ini, warga negara berhak atas jaminan-jaminan sosial ekonomi yang

bermakna sebagai jaminan akan terselenggaranya kehidupan yang sejahtera. Dalam realisasi konsep *civil citizenship* setiap warga akan menemukan dirinya beridentitas sebagai makhluk liberal yang hidup dalam suasana berkebebasan guna mengembangkan kepribadiannya.

## **7. Konsep Demokrasi Sebagai Suatu Nilai**

Nilai merupakan realitas abstrak sebagai takaran, mutu dalam kehidupan manusia (Nurcahya, 2018). Demokrasi sebagai suatu nilai memiliki gagasan maupun sikap hidup yang mengutamakan persamaan hak dan keewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Demokrasi sebagai suatu nilai bermakna bahwa demokrasi ini selain berkaitan dengan urusan kenegaraan tetapi juga berkaitan dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai demokrasi merupakan hal yang penting untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya jikalau tidak adanya kondisi tersebut maka pemerintah akan sulit menegakkan sistem demokratis.

Henry B. Mayo (Widiastuti, 2010) juga merincikan nilai dalam demokrasi sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan secara damai
2. Menjamin ada perubahan secara damai dalam masyarakat
3. Pergantian pimpinan secara teratur
4. Meminimalisir adanya kekerasan
5. Menerima adanya keberagaman
6. Menegakkan keadilan

Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi menurut pendapat Cipto dalam (Tukiran dkk, 2017) meliputi:

1. kebebasan menyatakan pendapat

2. kebebasan berkelompok
3. berpartisipasi secara bebas
4. kepercayaan
5. rasa kesetaraan
6. kerjasama

Selain nilai-nilai yang dikemukakan diatas, nilai yang melekat dalam demokrasi menurut Suprpto dalam (Kusmanto, 2014) ialah:

1. Adanya keterlibatan warga negara didalam pengambilan kebijakan
2. Persamaan bagi semua pihak
3. Kebebasan dan perlindungan terhadap martabat manusia
4. Adanya sistem perwakilan
5. Pemerintahan yang berdasarkan hukum
6. Pemerintahan oleh rakyat
7. Pendidikan umum dan pendidikan politik yang memadai untuk seluruh rakyat

Nilai-nilai demokrasi ini sesungguhnya sudah lama tertanam didalam masyarakat Indonesia yang dapat kita lihat dalam musyswarah yang didalamnya ditemukan nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang dapat dilihat ialah kebebasan mengemukakan pendapat, terbuka dalam mencapai keputusan, toleransi, menghargai satu sama lainnya, serta adanya rasa kebersamaan untuk mencapai keputusan bersama. Menurut John Dewey dalam (Naim 2016) demokrasi sebagai suatu nilai dapat terbentuk melalui pendidikan, oleh sebab itu sekolah adalah miniature dari masyarakat demokratis karena sudah adanya pengembangan nilai demokrasi.

## **8. Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan**

Demokrasi pada dasarnya mengakui semua warga negara memiliki keanekaragaman yang unik dan memiliki kesetaraan yang sama.

Demokrasi memberikan kesempatan yang luas untuk pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu, baik secara fisik maupun mental spiritual (Syahban & Sudarsono, 2018). Dengan demikian Pendidikan demokrasi adalah upaya untuk membentuk serta mengembangkan pengetahuan, sikap dan juga keterampilan demokratis.

Dalam Pendidikan demokrasi ini memberikan kesempatan bagi peserta didik, guru dan juga masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam mengelola kegiatan dalam lingkungan pendidikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam lingkungan Pendidikan yang demokratis, pembuatan kebijakan melibatkan partisipasi dari mereka yang akan menjalankan dan menerima dampak dari kebijakan tersebut (Zuliya, 2016). Menurut pendapat Winataputra demokrasi pendidikan adalah cara pandang hidup yang mengutamakan kesetaraan hak dan kewajiban yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan (Winataputra, 2007). Demokrasi masuk dalam pendidikan melalui penyusunan kurikulum dalam mata pelajaran PPKn. Dalam mata pelajaran PPKn pendidik sering memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyatakan pendapatnya tentang berbagai masalah atau isu kewarganegaraan. Isu-isu tersebut berasal dari lingkungan sekitar peserta didik maupun lingkungan yang lebih luas. Dengan cara mengemukakan pendapat tersebut bertujuan untuk memberikan suasana yang demokratis kepada peserta didik. Seperti yang sudah diketahui bahwa PPKn memang sengaja dirancang agar mempersiapkan warga negara yang kritis dan bertindak secara demokratis melalui berbagai aktivitas dalam pembelajaran. Menurut Depdiknas PPKn merupakan pembelajaran yang memfokuskan untuk membentuk warga negara yang paham dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas,

kreatif, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Arifin, 2021).

Dengan demikian konsep demokrasi dalam pendidikan mengharuskan peserta didik diperlakukan secara adil dengan tetap memahami keberagaman yang ada, dengan sistem pembelajaran yang menekankan pada hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Hubungan timbal balik tersebut dapat berupa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan juga sanggahan, memberikan contoh-contoh permasalahan yang ada di masyarakat agar peserta didik dapat berpikir kritis terhadap solusi dari permasalahan tersebut. Menurut pendapat Suharto pendidikan yang demokratis menekankan pada proses belajar mengajar yang ramah artinya pendidik memberikan apresiasi berupa pujian terhadap peserta didik sebagai bentuk penghargaan, sebab pujian dapat memberikan rangsangan agar peserta didik semangat dalam pembelajaran (Suharto, 2005). Itulah bentuk dari pembelajaran yang demokrasi.

Nilai-nilai Demokrasi yang ditanamkan dalam pendidikan bukan hanya bertujuan untuk melancarkan proses pembelajaran, namun dapat dipahami sebagai upaya yang terstruktur untuk peserta didik. Yang bertujuan agar peserta didik tidak hanya menerima pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu, melainkan memiliki pemahaman yang utuh mengenai demokrasi yang tepat.

## **9. Konsep Demokrasi di Sekolah**

Demokrasi di lingkungan sekolah memiliki tujuan untuk mendidik dan mengantarkan peserta didik menuju kedewasaan agar mereka mandiri, secara psikologis dan sosial. Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial. Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat

akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas di masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pembudayaan nilai demokrasi di sekolah agar terciptanya peserta didik yang bersikap demokratis.

Adapun demokrasi di lingkungan sekolah menurut Musthofiyah dalam (Musthofiyah, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan ketua organisasi dan ketua kelas dengan sistem musyawarah, pemilu, dan voting. Nilai-nilai demokrasi yang dapat diambil dari kegiatan OSIS yaitu:
  - a. adanya persamaan hak, dimana para siswa diberikan kesempatan yang sama untuk memilih dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu juga pemilihan ketua OSIS mengajarkan kepada para siswa kebebasan untuk menyatakan pendapat, sekaligus mengajarkan kepada para siswa tentang cara berdemokrasi secara baik dan benar sejak dini.
  - b. Nilai-nilai demokrasi dalam proses penetapan kepanitiaan dalam OSIS dapat dilihat dari kegiatan musyawarah penetapan kepanitiaan. Nilai-nilai demokrasi yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, tanggung jawab bersama atas hasil musyawarah, kerjasama antar pengurus OSIS, dan persamaan hak antara MPK dan pengurus OSIS
2. Pembagian tugas piket yang merata bagi semua siswa
3. Terjadi interaksi dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa saat pembelajaran
4. Upacara bendera yang dilaksanakan tepat pada waktunya dan pergantian petugas secara rutin
5. Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah
6. Bertanggung jawab akan tugas yang diberikan
7. Hadir tepat waktu

8. Menghargai pendapat orang lain
9. Membayar iuran wajib sekolah

### **2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Sikap Demokratis**

#### **1. Definisi Sikap**

Sebelum memahami mengenai sikap, kita perlu untuk memahami struktur dari sikap tersebut serta dengan komponennya. Struktur sikap terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif berupa keyakinan seseorang, komponen afektif berkaitan dengan emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. Komponen emosional berakar dari sikap yang paling bertahan terhadap pengaruh yang mungkin dapat mengubah sikap (Azwar, 1988).

Komponen kognitif, dalam komponen ini berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Dalam komponen ini tidak selamanya bersifat akurat, terkadang kepercayaan timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Selanjutnya komponen afektif, dalam komponen ini adanya keterlibatan perasaan maupun emosi, sebagai bentuk reaksi terhadap suatu objek yang akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yakni kepercayaan suatu objek baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat.

Terakhir adalah komponen konatif atau kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang yang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku yang ditimbulkan dalam keadaan tertentu dan menghadapi keadaan terhadap adanya stimulus. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual (Azwar, 1988).

Dalam arti sempit sikap merupakan sebuah pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Sabri dalam (Sabri, 2010) mendefinisikan sikap merupakan kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang maupun benda dengan suka maupun tidak suka, atau peduli tidak peduli. Selanjutnya menurut pendapat Katz dan Stotland (2016) sikap merupakan perpaduan dari: 1) respon kognitif mengenai apa yang diyakini, 2) respon mengenai perasaan yang menyangkut aspek emosional, 3) respon konatif berupa perilaku sesuai dengan dorongan hati.

Thurstone, Likert, dan Osgood dalam (Rakhmawati, 2013) sikap adalah suatu bentuk respon dari perasaan. Jadi sikap berasal dari perasaan baik maupun buruk yang didasarkan oleh karakter setiap individu. Sikap merupakan reaksi maupun respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus maupun objek. Sedangkan menurut Newcomb sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sehingga berdasarkan pengertian diatas, sikap bersifat tertutup dan merupakan predisposisi perilaku seseorang terhadap suatu stimulus. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah bentuk respon dari seseorang kepada suatu objek, respon tersebut di cerminkan melalui perilaku yang dilakukan. Sikap ini dimiliki seseorang sudah sejak dini dan setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda tergantung dengan individu masing-masing.

Sikap adalah perilaku seseorang yang berarti cerminan dari tingkah laku seseorang tersebut yang cenderung kepada penilaian dari masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di dalam masyarakat tertentu. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya (Gerungan, 2000). Sikap dapat menjadi awal kemunculan

dari sebuah tindakan yang kemudian berkembang untuk mencerminkan adanya niat khusus maupun umum berhubungan dengan respon terhadap sebuah kondisi.

Sikap juga merupakan sebuah bentuk perilaku yang ditunjukkan seseorang individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh sebab itu sikap harus didasarkan pada sebuah nilai.

Nilai memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebab nilai digunakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap manusia dalam kehidupan sosial (Fraenkel, 1977). Nilai yang dijadikan patokan tersebut ialah nilai luhur, kebaikan, kejujuran, dan religius. Nilai tersebut dikemas dalam bentuk norma, norma merupakan aturan yang berlaku dalam suatu daerah dan kelompok masyarakat yang ditaati dan dijalankan. Norma ini bertujuan sebagai kontrol atau pengawas kehidupan manusia agar tetap seimbang, dan sejalan dengan nilai-nilai yang mulia. Norma memiliki beberapa jenis yaitu, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma kebiasaan. Norma ini berkaitan dengan sanksi jikalau melanggar maka akan mendapatkan sanksi tersebut. Norma ini berkaitan erat dengan moral, karena orang yang memiliki nilai dan mentaati norma akan memiliki moral yang baik. Landasan dari moral seseorang adalah jikalau ia sudah mengikuti nilai dan norma yang berlaku.

Norma di setiap tempat memang berbeda oleh sebab itu, seseorang yang tidak menaati norma di tempat tinggalnya dianggap tidak bermoral. Setiap orang dikenal dengan karakter yang dapat membedakannya dengan orang lain yang terlihat dari tingkah laku, kebiasaan, pola pikir, dan cara menanggapi suatu persoalan. Simon Philips dalam Mu'in (2011:160) menyatakan bahwa karakter terbentuk dari nilai-nilai yang ada dan membentuk sebuah sistem,

sehingga menjadi dasar pikiran, sikap, dan juga perilaku yang diperlihatkan.

Karakter merupakan sifat, maupun sikap yang membedakan seseorang dengan orang lain disebabkan karakter setiap individu itu berbeda-beda (Samani dan Hariyanto 2012:42). Pendidikan karakter di lingkungan Pendidikan menjadi hal yang paling utama untuk membentuk karakter peserta didik agar dapat membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter sangat penting diajarkan dalam lingkungan Pendidikan terutama perguruan tinggi sebab, mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan sebuah pembangunan bangsa sehingga penting untuk membentuk karakter yang baik bagi siswa.

Menurut definisi dari Fakry Gaffar dalam (Kesuma dkk, 2012:5) Pendidikan karakter juga sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan agar dapat ditanamkan kedalam sikap seseorang. Jadi, dengan pendidikan karakter sikap seseorang akan diarahkan kepada kesadaran akan nilai-nilai yang baik agar terhindar dari perbuatan tercela.

Menurut Darmiyati dalam (Zuchdi, 1995), Pembentukan sikap, sikap dapat dibentuk dengan adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap suatu objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor juga dapat mempengaruhi pembentukan sikap itu antara lain, pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan atau lembaga agama, dan factor emosi dalam diri seseorang.

Menurut Slameto (Slameto, 2003) sikap dapat dibentuk melalui berbagai cara antara lain:

1. Melalui pengalaman yang membekas dan tidak dapat dilupakan
2. Melalui peniruan terhadap sebuah objek, dalam hal ini individu harus memiliki rasa kagum dan juga minat terhadap sebuah objek yang akan ditiru. Peniruan ini akan berjalan lancar apabila dilakukan secara kolektif.
3. Melalui sugesti, disini seorang individu membentuk sikap terhadap sebuah objek tanpa adanya alasan melainkan disebabkan oleh pengaruh dari orang lain.
4. Melalui identifikasi, hal ini ditiru oleh individu disebabkan oleh adanya ketertarikan secara emosional.

Menurut Saifuddin Azwar dalam (Diarsih, 2015) terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap antara lain:

1. Pengalaman pribadi, apa yang sudah dialami dan dilakukan oleh individu dapat membentuk sebuah tanggapan terhadap suatu objek sehingga menjadi dasar terbentuknya sikap.
2. Pengaruh dari orang lain, individu cenderung untuk bersikap yang sesuai dengan sikap yang dianggapnya searah, kecenderungan ini dapat menjadi dasar keinginan untuk bersikap terhadap sebuah objek.
3. Budaya juga dapat berpengaruh terhadap pembentukan sikap sebab budaya memberikan corak pengalaman hidup bagi seluruh kelompok masyarakat yang ada.
4. Media massa juga berpengaruh terhadap pembentukan sikap karena melalui media massa informasi dapat disalurkan sehingga informasi tersebut sampai pada individu dan membuat dasar kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.
5. Lembaga pendidikan dan juga lembaga agama, sebagai suatu system mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

6. Pengaruh emosional, terkadang bentuk sikap yang ditampilkan individu adalah bentuk dari pertahanan ego.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sikap dipengaruhi oleh pengalaman dari proses sosialisasi yang kemudian dapat terbentuk menjadi bagian dari kepribadian seseorang.

## **2. Sikap Demokratis**

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya. Oleh sebab itu untuk menjamin hak dan kewajiban dapat terpenuhi setiap warga negara haruslah bersikap demokratis. Winarno (2013;108) berpendapat bahwa demokrasi mengalami perkembangan baru yang tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan juga sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup maupun sikap hidup didalam masyarakat. Demokrasi memerlukan upaya nyata dari seluruh warga negara maupun penyelenggara negara untuk bersikap sesuai untuk mendukung pemerintahan dan sistem politik demokrasi (Diarsih, 2015). Perilaku yang sesuai tersebut menyangkut dengan nilai-nilai demokrasi.

Demokratis adalah perilaku yang harus warga negara terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap demokratis adalah perilaku, Tindakan, perasaan, sudut pandang individu yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, tanggung jawab, dan juga kebebasan berpendapat (Hemafitria dkk, 2015). Menurut Khristoforus dan Abdul Gofur berpendapat bahwa sikap demokratis sangat dibutuhkan agar warga negara mampu untuk menyesuaikan diri, toleransi, terbuka terhadap isu-isu keberagaman.

Warga negara yang demokratis adalah warga negara yang memiliki sikap demokratis. Memiliki keterampilan berpikir kritis, atau kemampuan berpikir yang terampil bisa membangun pribadi individu yang demokratis. Melalui uraian diatas mengenai sikap demokratis dapat diketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi menjadi sikap dan juga budaya demokratis, dan nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sikap yang demokratis. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap demokratis adalah bagian dari kepribadian seseorang yang melandasinya dalam berperilaku berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam proses pelaksanaan bentuk pemerintahan yang demokrasi atau demokratis.

### **3. Indikator Sikap Demokratis**

Menurut Nurcholish Madjid, ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut;

1. Kesadaran adanya pluralism, menghendaki adanya sikap positif terhadap adanya kemajemukan, sebab kondisi kemajemukan Indonesia dapat menjadi modal potensial bagi kemajuan demokrasi Indonesia
2. Musyawarah, musyawarah mengharuskan adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan negosiasi politik secara damai dan bebas dalam setiap pembentukan kebijakan
3. Cara – cara yang sesuai tujuan, norma ini menekankan pada hidup demokratis mengharuskan adanya kepercayaan bahwa cara harus sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya dilakukan sebatas pelaksanaan prosedur prosedur demokrasi (pemilu, suksesi kepemimpinan atau aturan mainnya) akan tetapi harus dilakukan melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari dan oleh

siapapun tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan.

4. Norma kejujuran dalam mufakat, faktor kejujuran dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi
5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban, sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda
6. Percobaan dan kesalahan (*trial and error*) dalam berdemokrasi, Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik untuk berdemokrasi (Nasution, A.R., 2016).

Selanjutnya Indikator dalam sikap demokratis menurut Fitri dan Wibowo dalam (Novi Rakhmawati 2013) yaitu:

1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
2. Setiap keputusan berdasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat
3. Interaktif dalam bersosialisasi
4. Menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan

Dalam membentuk sistem politik yang demokratis juga membutuhkan perbaikan budaya politik pada tingkat individu, baik pada tataran elit maupun massa yang meliputi sikap-sikap dan perilaku para pelaku yang terlibat didalam sistem politik tersebut. Sejalan dengan itu, Oesterreich dalam (Adlin dan Harto:2012) sikap demokratis individu termasuk generasi muda dapat diukur dengan cara melihat sejauhmana komitmen mereka untuk melakukan aktivitas politik yang demokratis berdasarkan indikator:

1. Komitmen melakukan kewajiban demokratis, diukur dengan kesediaan memilih dalam pemilu
2. Komitmen melaksanakan aktivitas politik konvensional, dengan cara bersedia bergabung dengan partai politik, membuat tulisan tentang politik di media massa, dan bersedia untuk memegang jabatan politik
3. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sosial, dengan cara menjadi sukarelawan untuk membantu masyarakat kurang beruntung dan kegiatan sosial
4. Komitmen melakukan kritik secara damai dalam demonstrasi damai
5. Kesediaan melakukan tindakan protes terhadap pemerintah

Dari beberapa indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap demokratis memiliki indikator sebagai berikut:

1. Berpartisipasi aktif di sekolah
2. Ikut serta dalam musyawarah di sekolah
3. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan
4. Mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain

Indikator-indikator tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam melihat sikap demokratis dalam diri peserta didik, agar dapat menjadi dasar dalam evaluasi sikap demokratis.

## **2.2 Kajian Penelitian Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sriwati pada tahun 2014, Program Studi Magister Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “Hubungan Pemahaman Reformasi dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Sikap Demokrasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah”. Metode penelitian adalah metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara

pemahaman reformasi dan wawasan kebangsaan terhadap sikap demokrasi mahasiswa pendidikan sejarah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai Hubungan pemahaman reformasi dan wawasan kebangsaan terhadap sikap demokrasi, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai Hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis siswa. Selanjutnya persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan demokrasi sebagai variabel dan jenis penelitian korelasi kuantitatif serta sama-sama mengamati mengenai sikap demokratis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ninis Ristiani Septiliana pada tahun 2011, Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, yang berjudul “Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi Dengan Sikap Demokrasi Pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2010/2011”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman dan budaya demokrasi dengan sikap demokrasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2010/2011. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas Hubungan pemahaman konsep demokrasi dan budaya demokrasi terhadap sikap demokrasi, sedangkan penelitian penulis meneliti Hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis siswa. Selanjutnya persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan demokrasi sebagai variabel dan jenis penelitian korelasi kuantitatif serta sama-sama mengamati mengenai hubungan demokrasi terhadap adanya sikap demokratis.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nellyani Ginting tahun 2016, Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, berjudul “Hubungan Antara Pemahaman Mahasiswa Tentang Konsep Demokrasi Indonesia Dengan Sikap Nasionalisme”. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pemahaman mahasiswa tentang konsep demokrasi Indonesia dengan sikap nasionalisme. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan salah satu variabel yang diteliti adalah sikap nasionalisme, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan variabel sikap demokratis. Selanjutnya persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan hubungan pemahaman konsep demokrasi sebagai variabel dan jenis penelitian yang sama-sama kuantitatif.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah. Perubahan sikap dalam diri seseorang tentu berdasarkan pada rasa kesadaran dari apa yang diinginkannya, Oleh sebab itu, dengan adanya pemahaman tentang sebuah konsep akan berpengaruh pada aspek kognitif yang berakibat pada perubahan perilaku akibat dorongan dari aspek afektifnya. Sikap dan perilaku tersebut harus tetap sesuai dengan sistem dari pemerintahan Indonesia. Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, tetapi juga memberikan tatanan nilai bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, karakter dan sikap haruslah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, sikap tersebut disebut dengan sikap demokratis.

Sikap demokratis dikalangan generasi muda sekarang ini khususnya siswa memang harus betul-betul menjadi perhatian sebab agar terciptanya pemerintahan yang demokrasi maka di dasarkan pada sikap warga negara yang harus demokratis. Pemahaman mengenai konsep demokrasi bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkan sikap demokratis di kehidupan sehari-hari. Kerangka piker dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



## 2.4 Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Monica Ciciliani, 2014) hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan peneliti sampai dengan adanya bukti melalui penyajian data atau pernyataan sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukakan. Sedangkan menurut Nasution dalam (Suwarno, 2006) hipotesis adalah dugaan tentang apa saja yang sedang peneliti amati. Dengan demikian, hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan juga kerangka berpikir diatas, maka peneliti menentukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak adanya hubungan antara pemahaman konsep demokrasi terhadap sikap demokratis pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala

Hi : Terdapat hubungan antara pemahaman konsep demokrasi terhadap sikap demokratis pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan dari variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan data-data dan menganalisis data secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara konsep demokrasi dengan sikap demokratis pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala

### **3.2 Populasi dan Sampel**

#### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek, objek, yang memiliki karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006) Populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang diteliti. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua subjek dan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas XI di SMA Negeri 1 Menggala dengan jumlah keseluruhan siswa 282 siswa.

**Tabel 3. 1 Jumlah Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Menggala**

No	Kelas	Total
1	XI Mipa 1	36
2	XI Mipa 2	35
3	XI Mipa 3	35
4	XI Mipa 4	35
5	XI Mipa 5	36
6	XI IPS 1	35
7	XI IPS 2	35
8	XI IPS 3	35
	<b>TOTAL</b>	<b>282</b>

*Sumber data sekunder*

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari seluruh objek penelitian yang diambil menggunakan tektik tertentu (Muhammad Ali 1987:64). Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto (2002:112) berpendapat bahwa apabila jumlah populasi kurang dari seratus, lebih baik jikalau semua populasi diambil dan dijadikan sebagai sampel dan jika populasinya lebih dari 100 maka diambil 10-15% atau 15%-25%.

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 25% dari 282 siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Menggala, maka jumlah sampel nya adalah 70 siswa. Masing-masing dirinci melalui tabel berikut:

**Tabel 3. 2 Jumlah Sampel Penelitian**

No	Kelas	Jumlah Peserta didik
1	XI Mipa 1	9
2	XI Mipa 2	9
3	XI Mipa 3	9
4	XI Mipa 4	9
5	XI Mipa 5	9
6	XI IPS 1	9
7	XI IPS 2	8
8	XI IPS 3	8
	<b>TOTAL</b>	<b>70 Siswa</b>

*Sumber: Data Tata Usaha*

### 3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai yang mempengaruhi dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi yaitu sebagai berikut:

#### 3.3.1 Variabel Bebas (X)

Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep demokrasi (X).

#### 3.3.2 Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap demokratis (Y).

### 3.4 Defisini Konseptual dan Operasional

#### 3.4.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel digunakan sebagai penegasan mengenai masalah yang diteliti, sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkan di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa devinisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1. Pemahaman Konsep Demokrasi

Pemahaman Konsep demokrasi secara sederhana berarti masyarakat yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Paham akan konsep demokrasi menjadi salah satu kewajiban setiap warga negara agar dapat melaksanakan tanggungjawab didalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemahaman ini dapat dibentuk berdasarkan penanaman yang dilakukan dalam lingkungan baik pendidikan maupun lingkungan sehari-hari.

## 2. Sikap Demokratis

Sikap demokrasi adalah bagian dari kepribadian seseorang yang mendorong untuk bertindak sesuai dengan nilai- nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu adalah toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dan komunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan serta keseimbangan.

### 3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian yang didasarkan kepada karakter yang dapat diamati (Suryabrata 2012:23). Dapat disimpulkan bahwa definisi operasional itu merupakan variabel yang diamati melalui pengoperasionalan variabel dengan proses penghitungan yang tepat.

#### 1. Pemahaman Konsep Demokrasi

Paham akan konsep demokrasi berarti menjalankan kehidupan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi agar dapat terciptanya lingkungan yang demokrasi.

Seorang siswa dapat dikatakan paham akan konsep demokrasi apabila melakukan hal-hal berikut:

- a. Menerjemahkan makna demokrasi
- b. Menginterpretasikan prinsip-prinsip demokrasi
- c. Mengeksplorasi nilai-nilai demokrasi

#### 2. Sikap Demokratis

Sikap demokratis adalah bagian dari kepribadian seseorang yang melandasinya dalam berperilaku berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam proses pelaksanaan bentuk pemerintahan yang demokrasi atau demokratis.

Adapun indikator sikap demokratis siswa, yaitu:

- a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah
- b. Ikut serta dalam musyawarah, mufakat
- c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan
- d. Mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain

### **3.5 Rencana Pengukuran Variabel**

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan butir-butir soal yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman konsep demokrasi pada siswa kelas XI SMA negeri 1 Menggala. Soal tes tersebut terdiri dari empat alternatif jawaban yaitu a, b, c, dan d. Kemudian peneliti akan menyebarkan angket kepada responden tentang sikap demokratis. Angket yang akan diberikan adalah angket tertutup, angket akan berbentuk pertanyaan dan akan diberikan tiga alternatif jawaban yaitu setuju, kurang setuju, tidak setuju, responden harus memilih salah satu dari ketiganya. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan kategori sebagai berikut:

1. Berhubungan  
Pemahaman konsep demokrasi dinyatakan berhubungan dengan sikap demokratis apabila siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala mampu bersikap secara demokratis sesuai dengan indikator sikap demokratis.
2. Cukup Berhubungan  
Pemahaman konsep demokrasi dinyatakan cukup berhubungan dengan sikap demokratis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala mampu bersikap secara baik meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan indikator sikap demokratis.
3. Tidak ada Hubungan  
Pemahaman konsep demokrasi dinyatakan tidak ada hubungan dengan sikap demokratis apabila siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala mencerminkan sikap tidak demokratis sesuai dengan indikator sikap demokratis.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang diterapkan sebagai berikut:

#### 1. Tes

Dalam penelitian ini, menggunakan tes sebagai alat maupun prosedur untuk mengukur sesuatu dengan cara dan aturan yang telah ditentukan. Bentuk tes yang digunakan berdasarkan prosedur pemberian angka (scoring) tipe obyektif dengan ciri utama hanya ada satu jawaban yang dianggap benar. Tes yang digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda pada materi PPKn yang bertema demokrasi dan akan dijawab oleh responden penelitian yaitu peserta didik di SMA Negeri 1 Menggala yang terpilih secara acak menjadi sampel penelitian. Dengan perhitungan skor yaitu 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang tidak sesuai.

#### 2. Angket

Penelitian ini menggunakan angket bersifat tertutup dengan model skala likert dalam bentuk ceklis serta telah ditentukan bahwa responden akan menjawab pertanyaan dari 3 alternatif jawaban sendiri yaitu S (Setuju), KS (kurang setuju), dan TS (Tidak setuju). Yang setiap jawabannya diberikan bobot nilai yang bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk alternatif jawaban setuju diberi skor 3
- b. Untuk alternatif jawaban cukup setuju diberi skor 2
- c. Untuk alternatif jawaban tidak setuju diberi skor 1

### 3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

#### 3.7.1 Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010), instrumen dikatakan valid apabila sudah mampu mengukur apa yang diinginkan. Instrumen dikatakan valid karena

sudah mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Oleh sebab itu, uji validitas ini menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin di ukur. Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi pearson product moment, sebagai berikut:

$$r_{xy} : \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Sumber: Sujarwena (2012)

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisiensi korelasi antar variabel x dan y

$n$  = jumlah sampel yang diteliti

$\sum x$  = jumlah skor X

$\sum y$  = jumlah skor Y

Setelah mengetahui hasil dari rumus pearson product moment, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka instrumenn dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji coba dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Adapun langkah-langkah dalam menghitung validitas menggunakan bantuan SPSS versi 22 yaitu: (1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) *Analyze >> Correlate >> Bivariate*; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak *Variabels*; (4) Klik *Pearson >> OK*.

Kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS berdasarkan nilai korelasi:

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item dinyatakan valid.
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi:

- a. Jika nilai signifikansi  $> \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi  $< \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan valid

### 3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dapat dipercaya digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen itu sudah baik. Uji reliabilitas ini dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara untuk mencari besaran angka reliabilitas yakni dengan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS versi 22.

Menurut Sekaran dan Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas ini ialah jika reliabilitas kurang dari 0.6 maka kurang baik, sedangkan jika 0,7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 3 Indeks Koefisien Reliabilitas**

Nilai Interval	Kriteria
<0,20	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup
0,6 – 0,799	Tinggi
0,8 – 1.00	Sangat Tinggi

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai cronbach's alpha pada perhitungan SPSS dengan nilai r tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan  $df = N - k$ ,  $df = N - 2$ ,  $N$  adalah banyaknya sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitas tabelnya yaitu:

1. Jika  $r$  hitung ( $r$  alpha)  $>$   $r$  tabel  $df$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.

2. Jika  $r$  hitung ( $r$  alpha) <  $r$  tabel df maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, skor total tidak diikut sertakan.
2. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian scale reliability analysis.
3. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan  $r$  tabel.

### 3.8 Analisis Butir Soal

#### 3.8.1 Taraf Kesukaran

Analisis taraf kesukaran ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal yang digunakan tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran ini menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal (Arikunto, 2002).

Cara menentukan tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{B}{Jx}$$

Keterangan: P: indeks kesukaran

B: jumlah siswa yang menjawab benar

J: Jumlah seluruh siswa peserta tes

Taraf indeks kesukaran dapat diklasifikasikan seperti tabel berikut ini:

**Tabel 3. 4 Klasifikasi Tingkat Kesukaran**

P-P	Klasifikasi
0,00 – 0,29	Sukar
0,30 – 0,69	Sedang
0,70 – 1,00	Mudah

(Arikunto, 2002).

### 3.8.2 Daya Beda

Daya beda soal digunakan untuk melihat kemampuan soal dapat membedakan peserta didik yang menguasai materi dengan peserta didik yang kurang menguasai materi. Rumus untuk membedakan daya beda soal adalah sebagai berikut:

$$DP = \frac{\bar{X}k_A - \bar{X}k_B}{\text{skor minimum}}$$

Keterangan:

DP: Daya Pembeda

$\bar{X}k_A$ : Rata-rata Kelompok Atas

$\bar{X}k_B$ : Rata-rata Kelompok Bawah

Adapun penentuan kategori daya beda soal didasarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 5 Kategori Daya Beda**

Rentang Nilai	Kriteria
0,40-1,00	Sangat Baik
0,30-0,39	Baik
0,20-0,29	Cukup
-1,00-0,19	Sangat Jelek

### 3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengetahui data hasil tes dan angket tentang hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala, selain itu tes dan angket juga bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam bentuk kalimat dan angka secara sistematis yang dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam pengelolaan data tersebut menggunakan rumus interval yaitu:

### 3.9.1 Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari tes (pemahaman konsep demokrasi) dan angket (sikap demokratis). Analisis distribusi frekuensi ini dilakukan untuk mengetahui klasifikasi serta persentase tingkat hubungan pemahaman konsep demokrasi sikap serta demokratis.

Analisis distribusi dalam Wahab (2021) dengan persamaan sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = nilai tertinggi

NR = nilai terendah

K = kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variabel yang bersangkutan

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel

Suharsimi Arikunto (2010) berpendapat bahwa untuk mengetahui banyaknya persentase yang didapat maka digunakan dengan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang baik

0% - 39% = Tidak baik

### 3.9.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan positif yang signifikan dari pemahaman konsep demokrasi (X) sebagai variabel bebas, sikap demokratis (Y) terikat. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment*. Menurut Riduwan dan Akdon (2005) korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik analisis korelasi ini masuk kedalam Teknik statistic parametik yang memakai data interval dan rasio dengan persyaratan yaitu: data berdistribusi normal, data dihubungkan berpola linier, dan data yang dihubungkan memiliki pasangan yang sesuai dengan objek yang sama.

Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan SPSS 22, korelasi *Pearson Product Moment* dilambangkan ( $r$ ) dengan ketentuan nilai  $r$  tidak lebih dari ( $-1 \leq r \leq +1$ ). Apabila  $r = 1$  artinya korelasi negatif sempurna, jika  $r = 0$  artinya tidak ada korelasi, dan jika  $r + 1$  berarti korelasinya sangat kuat.

Sedangkan arti nilai  $r$  akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai  $r$  sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Interpretasi Nilai r**

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1000	Sangat Kuat

*Sumber; Sugiyono (2008)*

Kriteria pengambilan keputusan untuk Korelasi Pearson

Product Moment adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi hasil riset  $< 0,05$ , maka hubungan Pemahaman Konsep Demokrasi (X) dengan Sikap Demokratis (Y) signifikan

- b. Jika nilai signifikansi hasil riset  $> 0,05$ , maka hubungan Pemahaman Konsep Demokrasi (X) dengan Sikap Demokratis (Y) tidak signifikan

Adapun langkah-langkah analisis data Korelasi dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut:

- a) Buka lembar kerja/file input Data Penelitian.
- b) Pilih menu analyze, kemudian pilih submenu correlate dan pilih bivariate.
- c) Kotak variabel diisi dengan variabel yang akan dianalisis dengan cara blok variabel X dan Y kemudian pindahkan ke kotak variabel.
- d) aktifkan *Pearson*, kemudian pilih *Two-tailed*.  
aktifkan *flag significant correlations*, dan tekan Ok

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis siswa” dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara “pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis oleh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Menggala”. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan tentang pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis siswa, diperoleh hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut.

Pemahaman akan membentuk pola pikir yang nantinya menciptakan suatu sikap. Dengan demikian adanya pemahaman konsep demokrasi yang ada dalam diri siswa seperti menerjemahkan makna demokrasi, menjalankan prinsip demokrasi, dan juga menjalankan nilai-nilai demokrasi maka akan berdampak terhadap sikap demokratis siswa tersebut. Selain dari pemahaman konsep demokrasi terdapat faktor lain diluar pemahaman konsep demokrasi, faktor-faktor tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam organisasi sekolah, pembiasaan dari orangtua, juga kemampuan pribadi dari tiap individu.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Peserta Didik**

Bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan juga keaktifan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami betapa pentingnya menguasai pemahaman mengenai demokrasi. Agar siswa dapat bersikap demokratis dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat.

### **5.2.2 Bagi Pendidik**

Bagi pendidik atau guru diharapkan lebih memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman sehingga tidak hanya berfokus pada hafalan. Pendidik juga diharapkan mampu membantu dan menjadi motivator peserta didik dalam menanamkan dan membiasakan kemampuan belajar yang kritis dan juga bersikap yang baik dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki sikap demokratis.

### **5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penelitian lebih lanjut mengenai hubungan pemahaman konsep demokrasi dengan sikap demokratis siswa dari faktor-faktor lainnya agar penelitian berikutnya menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Syafri. (2012). Pemetaan Sikap Demokratis Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. *Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI*, 7.
- Afan Gaffar. (2001). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Ansari, Bansu I. (2016). Komunikasi Matematik, Strategi Berpikir Dan Manajemen Belajar: Konsep Dan Aplikasi. *Banda Aceh: PeNA*.
- Arifin. (2021). Persepsi Siswa Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Research and Development Journal of Education*, 7(1),
- Arikunto, Suharsimi. (2005). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. *Jakarta: Bumi Aksara*
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Astawa Ari. (2017). Integrasi Nasional. *Universitas Udayana*.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. *Yogyakarta: Rineka Cipta*.
- Avianto, S. (2013). Penanaman Nilai Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Skripsi S, 1*.
- Azwar, Saifudin (1988). Sikap Manusia. *Yogyakarta: Liberty*.
- Azyumardi Azra. (2000). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. *Jakarta: ICCE UIN Jakarta*.
- Choirul Mahfud. (2010). Pendidikan Multikultural. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Darmiyati Zuchdi. (1995). Pembentukan Sikap. *Jurnal: Cakrawala Pendidikan* (2).
- Djaafar, L., Lukum, R., Adjie, Z., Damopolii, R., Wantu, S., & Alim, S. R. (2021). Membangun Nilai-nilai Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdidas*, 2(6), 1311-1315.

- Dwi Sulisworo, (2012), *Demokrasi, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012; Universitas Ahmad Dahlan*
- Fisher, B. Aubrey. (1986). *Teori-Teori Komunikasi. CV:Remadja Karya:Bandung.*
- Gregorius Sahdan, (2004), *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto. Produk edukasi Yogyakarta.*
- Hemafitria, dkk. (2015). Implementasi Sikap Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 2, No. 2.*
- Juliardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 2(2), 3.*
- Kadek Diarsih. (2015). Pengaruh Partisipasi Pada Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Terhadap Sikap Demokratis Siswa Di SMA Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015. *Skripsi. Lampung: Universitas Lampung*
- Martono, Nanang. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Miriam Budiardjo. (1975). *Masalah Kenegaraan. Jakarta: PT. Gramedia.*
- Musthofiyah. (2012). Pembudayaan Nilai-nilai Demokrasi Di Sekolah Dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Jurnal: eprints.ums.ac.id*
- Nasution, A.R.. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (2)*
- Niaborhu, dkk. (2020). Hubungan Pemahaman Sila Keempat Pancasila Dengan Sikap Demokratis Masyarakat Desa Laenuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaran, Vol 2.*
- Ninis Ristiani. (2011). Hubungan antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi Dengan Sikap Demokrasi Pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2010/2011. *Perpustakaan UNS.*
- Novianty, Firmansyah. (2020). Peran Dosen Program Studi PPKN Dalam Mengembangkan Budaya Demokrasi Pancasila dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1*

- Nurchahya. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Mata Pelajaran PPKn Di SMA Negeri 6 Takalar. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Pasaribu, S. (2016). Politik Aristoteles. Yogyakarta: *Narasi-Pustaka Promothe*
- Radiusman. (2020). Studi Literasi: pemahaman Konsep Siswa Pada pembelajaran Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika*.
- Raimundus. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Undiknas, Vol 4*.
- Rangkuti, A. (2018). Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Ruseffendi, E.I. 2006. Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya Dalam Pengajaran Matematika Untuk meningkatkan CBSA. Bandung: Tarsito
- Setyo Nugroho. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum. Vol 1*.
- Slameto. (2003). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Sudijono, A. (1996). Pengantar Evaluasi Pendidikan. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi. *Bandung: Alfabeta*
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B). *Bandung: Alfabeta*.
- Suharto, Edi. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat, *bandung: Refika Aditama*.
- Supriadi dan Darmawan (2012) Komunikasi Pembelajaran. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*
- Suryabrata, S. (2012). Metode Penelitian. *Jakarta: Rajawali Pers*.

- Syahban, Sudarsono. (2018). Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Studdy Kasus SMA Negeri 6 Takalar. *Jurnal Pendidikan Sosiologi 2*.
- Taniredja, Tukiran dkk. (2013). Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif. *Bandung: Alfabeta*.
- Tukiran dkk. (2017). Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi Dengan Model Pembelajaran Diskusi Kelas. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Wibowo. (2012). Manajemen Kinerja. *Jakarta: Rajawali Pers*
- Widiastuti Yulinda. (2010). Peranan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 4 Bukit Kemuning Lampung Utara Tahun Pelajaran 2009/2010. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.
- Wignjosoto, Soetandyo. (2006). Perkembangan Pemikiran dan Praktik demokrasi. *Jakarta: Komunitas Indonesia untuk demokrasi*.
- Winarno. (2013). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. *Jakarta: PT Bumi Aksara*
- Winataputra, U. S. (2002). Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Winataputra, U.S. & Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia
- Wowo Sunaryo Kuswana, (2012). Taksonomi Kognitif, (*Bandung: PT Remaja Rosdakarya*), 117. 4 *Ibid.*, 44-49.
- Zuliya Loka Sari. (2016). Penanaman Nilai Demokrasi Dalam Mata Pelajaran PKN Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Ungaran. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Winarno. (2013). Paradigma Baru Pendidikan kewarganegaraan. *Jakarta: PT Bumi Aksa*.
- Henry S, Rachmah I. (2012). Komunikasi, Politik, Media, dan Demokrasi. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Mahfud MD. (2003). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. *Jakarta: PT Rineka Cipta*.

R. Siti Zuhro. (2009). *Demokrasi Lokal “Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Yogyakarta: Ombak.*